

## Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Anggun Suciani Dewi Pratiwi, Siti Nuridah, Emy Setyawati Melati Putri

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : [21110037@pertiwi.ac.id](mailto:21110037@pertiwi.ac.id) , [siti.nuridah@pertiwi.ac.id](mailto:siti.nuridah@pertiwi.ac.id) , [emy.putri@pertiwi.ac.id](mailto:emy.putri@pertiwi.ac.id)

### Article History:

Received: 25 Juni 2025

Revised: 02 September 2025

Accepted: 18 September 2025

### Keywords:

Jumlah  
Wisatawan, Jumlah Hotel,  
Tingkat Hunian Hotel,  
Penerimaan Pajak Hotel

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020–2024. Pajak hotel merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah, khususnya di wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi seperti Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini terfokus pada wisatawan domestik, hotel berbintang dan tingkat hunian hotel berbintang. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independent yaitu jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Secara parsial tingkat hunian hotel menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Sedangkan jumlah wisatawan dan jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pajak hotel. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat sektor pariwisata dan menciptakan strategi yang mampu meningkatkan daya tarik wisata serta tingkat hunian hotel.

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak hotel ialah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Sejumlah penelitian telah menguji keterkaitan antara ketiga variabel tersebut dengan penerimaan pajak hotel di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya, (Nur Ainun Jariah, 2023) di Kota Banjarmasin menemukan bahwa

kenaikan jumlah wisatawan maupun tingkat hunian hotel secara simultan memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kedatangan wisatawan dan meningkatnya permintaan akomodasi berpeluang mendorong basis pajak hotel.

Dinamika penerimaan pajak hotel di Jawa Barat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor, diantaranya jumlah wisatawan yang berkunjung, banyaknya jumlah hotel yang tersedia, dan tingkat hunian hotel di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan yang signifikan pada penerimaan pajak hotel di Jawa Barat, yang diduga erat kaitannya dengan perubahan jumlah wisatawan, pertumbuhan jumlah hotel, serta variasi tingkat hunian hotel. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Berikut ini tabel pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Jawa Barat tahun 2020 – 2024 :

**Tabel 1. 1. Statistik Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Wisatawan Asing Di Jawa Barat Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Jumlah Wisatawan                                |                                           |                                                    |                                              |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | Wisatawan Domestik - Hotel Bintang (Ribu Orang) | Wisatawan Domestik - Hotel Melati (Orang) | Wisatawan Mancanegara - Hotel Bintang (Ribu Orang) | Wisatawan Mancanegara - Hotel Melati (Orang) |
| 2020  | 118,56                                          | 1.841.886                                 | 118,56                                             | 8.006                                        |
| 2021  | 8.505                                           | 4.295.985                                 | 56,81                                              | 6.011                                        |
| 2022  | 12.346                                          | 4.472.316                                 | 145,20                                             | 1.810                                        |
| 2023  | 13.778                                          | 4.577.241                                 | 226,16                                             | 6.348                                        |
| 2024  | 14.438.989                                      | 4.869.177                                 | 334.028                                            | 8.414                                        |

Berdasarkan data jumlah wisatawan yang menginap di hotel bintang dan hotel melati di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat perbedaan yang signifikan baik dari segi kategori wisatawan maupun perkembangan jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada kategori wisatawan domestik yang menginap di hotel bintang, jumlah wisatawan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 118,56 ribu orang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 8.505 ribu orang, kemudian meningkat menjadi 12.346 ribu orang pada tahun 2022, dan 13.778 ribu orang pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik yang menginap di hotel bintang mencapai 14.438,989 ribu orang. Secara total, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, jumlah wisatawan domestik yang menginap di hotel bintang di Jawa Barat tercatat sebanyak 14.473.736,23 ribu orang. Sementara itu, pada kategori wisatawan domestik yang menginap di hotel melati, jumlahnya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada 2020, tercatat sebanyak 1.841.886 orang wisatawan domestik menginap di hotel melati. Angka ini naik menjadi 4.295.985 orang pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 4.472.316 orang pada 2022, dan mencapai 4.577.241 orang pada 2023. Pada tahun 2024, tercatat 4.869.177 orang wisatawan domestik menginap di hotel melati. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun tersebut, jumlah wisatawan domestik yang menginap di hotel melati di Jawa

Barat mencapai total 20.056.605 orang. Di sisi lain, untuk kategori wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang, jumlahnya juga menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Pada 2020, tercatat sebanyak 118,56 ribu orang wisatawan mancanegara menginap di hotel bintang. Angka ini sempat menurun menjadi 56,81 ribu orang pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 145,20 ribu orang pada tahun 2022, naik lagi menjadi 226,16 ribu orang pada tahun 2023, dan mencapai 334,028 ribu orang pada tahun 2024. Jika diakumulasikan, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang selama lima tahun tersebut mencapai 334.575 ribu orang. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara yang menginap di hotel melati, jumlahnya tercatat 8.006 orang pada tahun 2020. Angka ini kemudian menurun menjadi 6.011 orang pada 2021, lalu naik menjadi 1.810 orang pada 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 6.348 orang pada 2023, dan mencapai 8.414 orang pada tahun 2024. Secara total, selama lima tahun, jumlah wisatawan mancanegara yang menginap di hotel melati di Jawa Barat tercatat sebanyak 30.589 orang.

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat setiap tahunnya mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti promosi pariwisata, infrastruktur, keamanan, serta tren wisata domestik dan mancanegara. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2019 jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Jawa Barat mencapai lebih dari 60 juta orang, sedangkan wisatawan mancanegara mencapai sekitar 1,5 juta orang. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, jumlah tersebut mengalami penurunan drastis dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 pada penerimaan pajak hotel di wilayah ini. Penurunan jumlah wisatawan tersebut menyebabkan banyak hotel mengalami penurunan tingkat hunian, bahkan beberapa di antaranya terpaksa menutup operasional sementara atau permanen. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan penerimaan pajak hotel.

**Tabel 1.2. Statistik Jumlah Hotel, Tingkat Hunian Hotek dan Penerimaan Pajak Hotel Di Jawa Barat Tahun 2020 - 2024**

| Tahun | Jumlah Hotel     |              | Tingkat Hunian Hotel |              | Penerimaan Pajak Hotel |
|-------|------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
|       | Hotel Berbintang | Hotel Melati | Hotel Berbintang     | Hotel Melati |                        |
| 2020  | 599              | 2.190        | 422,65               | 20,01        | 409.002.978.505        |
| 2021  | 562              | 1.626        | 475,64               | 19,54        | 457.592.815.496        |
| 2022  | 702              | 2.054        | 611,44               | 24,47        | 795.258.299.282        |
| 2023  | 681              | 2.259        | 614,74               | 23,22        | 875.948.656.529        |
| 2024  | 693              | 2.263        | 613,04               | 22,89        | 940.383.320.635        |

Selain jumlah wisatawan, pertumbuhan yang cukup pesat juga mempengaruhi jumlah hotel di Jawa Barat selama satu dekade terakhir. Data jumlah hotel di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang dinamis dari tahun 2020 hingga 2024. Hotel di Jawa Barat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hotel berbintang dan hotel melati. Menurut data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas hotel di Jawa Barat merupakan hotel melati, yang jumlahnya secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan hotel berbintang setiap tahunnya. Namun, adanya fluktuasi pada jumlah hotel berbintang dan hotel melati dari tahun ke tahun juga menggambarkan dinamika sektor perhotelan di Jawa Barat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, serta kondisi ekonomi secara umum. Pertumbuhan jumlah hotel

didorong oleh meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kemudahan perizinan dan promosi investasi. Namun, pertumbuhan jumlah hotel yang kurang seimbang dengan banyaknya wisatawan yang signifikan dapat menyebabkan tingkat hunian hotel menjadi rendah, sehingga berpotensi menurunkan penerimaan pajak hotel. Data tingkat hunian hotel di Jawa Barat pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang menarik, baik untuk kategori hotel berbintang maupun hotel melati. Untuk hotel berbintang, tingkat hunian pada tahun 2020 tercatat sebesar 422,65. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 475,64, kemudian naik signifikan menjadi 611,44 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat hunian hotel berbintang mencapai 614,74, dan pada tahun 2024 berada di angka 613,04. Jika dijumlahkan secara keseluruhan selama lima tahun, tingkat hunian hotel berbintang di Jawa Barat mencapai total 2.737,51. Sementara itu, tingkat hunian hotel melati juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun nilainya cenderung lebih rendah dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2020, tingkat hunian hotel melati tercatat sebesar 20,01. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 19,54, kemudian naik menjadi 24,47 pada tahun 2022. Pada 2023, tingkat hunian hotel melati berada pada angka 23,22, dan pada 2024 mencapai 22,89. Secara total selama lima tahun, tingkat hunian hotel melati di Jawa Barat mencapai 110,13.

Persaingan antar hotel yang semakin ketat juga dapat memicu perang harga, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan hotel dan berimplikasi pada menurunnya setoran pajak hotel ke pemerintah daerah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Jawa Barat masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, upaya peningkatan penerimaan pajak hotel tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga memerlukan strategi yang komprehensif dalam pengelolaan jumlah hotel dan peningkatan tingkat hunian hotel. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Jawa Barat juga berkaitan dengan adanya perbedaan antar daerah. Beberapa daerah dengan destinasi wisata unggulan cenderung memiliki penerimaan pajak hotel yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang kurang berkembang sektor pariwisatanya. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di masing-masing daerah, agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan PAD

## **LANDASAN TEORI**

### **Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel kepada tamu atau pengguna jasa. Pajak ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di wilayah yang memiliki sektor pariwisata berkembang. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah pada bisnis hotel dan sejenisnya, seperti motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak ini merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah setempat dan digunakan untuk mendukung layanan umum, infrastruktur, dan proyek-proyek pembangunan lainnya (Pasaribu & Woyanti, 2024). Pajak akomodasi adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan layanan akomodasi/resor (termasuk layanan terkait lainnya) Pajak akomodasi berlaku atas pelayanan yang diberikan hotel sebagai kompensasi, termasuk juga pelayanan

penunjang seperti fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, dan fasilitas hotel lainnya yang memberikan kemudahan dan kenyamanan (Sari et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan utama sistem perpajakan daerah di Indonesia, Pajak Hotel dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel. Layanan ini tidak hanya mencakup fasilitas penginapan, tetapi juga meliputi berbagai jasa tambahan yang umumnya tersedia di hotel, seperti penyediaan makanan dan minuman, fasilitas kebugaran, kolam renang, dan layanan sejenis lainnya yang digunakan oleh para tamu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hotel didefinisikan sebagai suatu usaha penyedia jasa akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi tamu, seperti kamar tidur, makanan dan minuman, serta pelayanan tambahan lain seperti ruang pertemuan, kolam renang, dan layanan laundry. Dengan demikian, jumlah hotel mencerminkan banyaknya entitas usaha penginapan yang terdaftar dan aktif menyediakan jasa kepada masyarakat atau wisatawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hotel merupakan bangunan yang memiliki banyak kamar dan disewakan kepada orang-orang sebagai tempat menginap, terutama bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Hotel juga berfungsi sebagai tempat makan dan merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, di mana setiap orang bisa mendapatkan layanan berupa penginapan, makanan, dan minuman.

### Wisatawan

Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan diartikan sebagai "orang yang melakukan wisata." Meskipun definisi ini terkesan singkat, istilah "wisata" merujuk pada kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara dengan tujuan menikmati objek atau daya tarik wisata.

Secara etimologis, kata "wisatawan" berasal dari bahasa Sanskerta "wisata" yang berarti "perjalanan," yang memiliki makna serupa dengan kata "travel" dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, wisatawan dapat disamakan dengan "traveler," yaitu seseorang yang melakukan perjalanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, wisatawan dibedakan menjadi dua kategori yaitu :

1. Wisatawan nusantara (domestik): warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.
2. Wisatawan mancanegara (internasional): warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk tujuan wisata.

Krapf Krapf Hunziker, seorang ahli di bidang pariwisata, menyatakan bahwa wisata merupakan rangkaian hubungan yang muncul dari aktivitas perjalanan sementara yang dilakukan oleh seseorang yang bukan penduduk asli di daerah yang dikunjungi. Wisatawan yang mengunjungi satu tempat ke tempat lain dan kuantitas pengunjungnya meliputi wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal dan mereka tidak hanya mengunjungi lokasi wisata, tetapi juga mengunjungi tempat lain, Misalnya saja di rumah keluarga dan kerabat (Erliyatn et al., 2023). Menurut (Alamsyah, Sutanto, dan Suriadi et al., 2024) banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Ada

Terdapat berbagai jenis wisatawan yang dapat dibedakan berdasarkan asal, tujuan, dan cara perjalanannya. Berikut ini adalah jenis-jenis serta karakteristik dari wisatawan:

1. Wisatawan lokal (local tourist): wisatawan yang melakukan perjalanan ke tempat wisata

- di dalam negeri, berasal dari wilayah yang masih berada dalam satu negara.
2. Wisatawan mancanegara (international tourist): wisatawan yang datang dari luar negeri untuk mengunjungi tempat wisata di suatu negara.
  3. Holiday tourist: wisatawan yang bepergian dengan tujuan utama untuk bersantai, berlibur, atau menikmati waktu luang.
  4. Business tourist: wisatawan yang melakukan perjalanan untuk kepentingan bisnis, pekerjaan, atau urusan profesional lainnya.
  5. Common interest tourist: wisatawan yang bepergian dengan tujuan tertentu, seperti kegiatan akademis, mengunjungi keluarga, pengobatan, dan sejenisnya.
  6. Individual tourist: wisatawan yang melakukan perjalanan secara mandiri, tanpa bergabung dalam kelompok.
  7. Group tourist: wisatawan yang bepergian bersama dalam sebuah kelompok atau rombongan.

### **Jumlah Hotel**

Secara umum jumlah hotel merujuk pada total satuan usaha penginapan yang beroperasi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jumlah ini menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas dan potensi sektor akomodasi suatu daerah, khususnya dalam mendukung pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya.

Jumlah hotel adalah keseluruhan bangunan yang memiliki kamar dalam jumlah banyak dan dapat disewakan sebagai tempat untuk menginap dan juga bisa mendapatkan fasilitas penunjang yang disediakan oleh pengusaha perhotelan yang terdapat di suatu wilayah tertentu baik hotel berbintang maupun hotel non bintang (melati).

Dalam kajian perencanaan pembangunan pariwisata, jumlah hotel sering kali digunakan sebagai salah satu indikator daya dukung infrastruktur pariwisata. Semakin tinggi jumlah hotel, biasanya mengindikasikan pertumbuhan sektor pariwisata yang baik dan meningkatnya kebutuhan akomodasi karena mobilitas masyarakat dan kunjungan wisata yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, klasifikasi hotel di Indonesia digolongkan ke dalam dua kategori utama berdasarkan kelasnya:

1. Hotel Bintang  
Hotel dalam kategori ini diklasifikasikan mulai dari bintang satu hingga bintang lima. Pengelompokan ini didasarkan pada kriteria penilaian tertentu yang mencakup standar pelayanan, fasilitas, dan kualitas layanan yang disediakan.
2. Hotel Nonbintang  
Hotel Nonbintang merupakan jenis hotel yang belum memenuhi standar penilaian untuk dikategorikan sebagai hotel berbintang. Hotel Nonbintang umumnya menawarkan fasilitas dan layanan yang lebih sederhana dibandingkan hotel berbintang.

### **Jumlah Hunian**

Menurut BPS, tingkat hunian kamar hotel atau biasa disebut Occupancy Rate (OR) adalah persentase banyaknya kamar yang terjual atau digunakan dibandingkan dengan jumlah kamar tersedia selama periode tertentu di hotel klasifikasi bintang maupun non-bintang. Menurut (Pasaribu & Woyanti, 2024), tingkat hunian kamar hotel adalah persentase dari jumlah kamar yang telah disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di tempat penginapan



tersebut. Tingkat hunian kamar dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu tempat penginapan dalam menjual kamarnya.

Dengan kata lain, tingkat hunian hotel menunjukkan berapa besar proporsi kamar yang terisi (occupied) dari total kamar yang tersedia (available) dalam suatu waktu. BPS menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Hunian Kamar} = (\text{Jumlah kamar yang digunakan} / \text{Jumlah kamar tersedia}) \times 100$$

Misalnya, jika sebuah hotel memiliki 100 kamar dan 75 di antaranya terisi dalam satu hari, maka tingkat hunian hari itu adalah 75%.

tingkat hunian hotel adalah ukuran persentase kamar hotel yang digunakan oleh tamu dalam periode waktu tertentu. Baik menurut pemerintah melalui BPS maupun para ahli manajemen hotel, indikator ini sangat penting dalam mengukur performa industri perhotelan dan sektor pariwisata secara lebih luas. Data ini juga menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi bisnis dan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan realisasi penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Obyek dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan penerimaan pajak hotel di Provinsi Jawa Barat. Secara khusus, yang menjadi fokus adalah data jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, serta penerimaan pajak hotel dari tahun 2020 hingga 2024. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan alat statistik evIEWS versi 11 dan SPSS Versi 25 dengan uji yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1.3 Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics          |    |                |                 |                  |                   |
|---------------------------------|----|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                                 | N  | Minimum        | Maximum         | Mean             | Std. Deviation    |
| Jumlah Wisatawan Domestik       | 60 | 88492,35       | 2346478,51      | 1154047,0667     | 648097,70078      |
| Jumlah Hotel Berbintang         | 60 | 25,37          | 85,31           | 53,9500          | 16,40579          |
| Tingkat Hunian Hotel Berbintang | 60 | 19,08          | 74,71           | 45,6252          | 15,05515          |
| Penerimaan Pajak Hotel          | 60 | 18461940002,00 | 114283000000,00 | 57969771732,9667 | 25526891782,15172 |
| Valid N (listwise)              | 60 |                |                 |                  |                   |

Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan domestik memiliki nilai rata-rata sebesar 1.154.047,07, dengan nilai minimum sebesar 88.492,35 dan maksimum mencapai 2.346.478,51, serta standar deviasi sebesar 648.097,70. Untuk variabel jumlah hotel berbintang, diperoleh nilai rata-rata sebesar 53,95, dengan nilai minimum 25,37 dan maksimum 85,31. Standar deviasi sebesar 16,41 menunjukkan tingkat variasi sedang hingga tinggi, yang menggambarkan fluktuasi jumlah hotel berbintang setiap periodenya. Angka ini bisa dipengaruhi oleh kondisi musiman, event pariwisata, hingga dampak dari pandemi yang terjadi pada sebagian besar periode pengamatan. Sementara itu, tingkat hunian hotel berbintang menunjukkan nilai

rata-rata sebesar 45,63 persen, dengan nilai terendah sebesar 19,08 persen dan tertinggi mencapai 74,71 persen. Standar deviasi sebesar 15,05 mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi dalam tingkat keterisian kamar hotel antarperiode. Variasi ini bisa disebabkan oleh perbedaan musim, pelonggaran kebijakan sosial pasca pandemi, dan tren permintaan terhadap jasa akomodasi. Adapun variabel penerimaan pajak hotel memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 57.969.771.732,90 atau sekitar Rp 57,97 miliar. Nilai terendah tercatat sebesar Rp 1.846.194.002, sedangkan nilai tertinggi mencapai Rp 114.283.000.000. Besarnya standar deviasi, yaitu Rp 25.526.891.782,10, menegaskan bahwa terjadi fluktuasi yang signifikan dalam penerimaan pajak hotel, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh naik turunnya tingkat hunian hotel dan jumlah wisatawan.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel independen pada penelitian ini adalah Jumlah Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel Berbintang, dan Tingkat Hunian Hotel Berbintang sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Hotel.

**Tabel 1.4 Uji Hipotesis**

Dependent Variable: PAJAK\_HOTEL

Method: Least Squares

Date: 06/13/25 Time: 14:42

Sample: 1 60

Included observations: 60

| Variable                  | Coefficient     | Std. Error            | t-Statistic | Prob.         |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|
| WISATAWAN_DOMESTIK        | -6.34E-08       | 1.27E-07              | -0.500958   | <b>0.6184</b> |
| HOTEL_BERBINTANG          | -0.017353       | 0.011090              | -1.564672   | <b>0.1233</b> |
| TH_HOTEL_BINTANG          | 0.032895        | 0.016181              | 2.032917    | <b>0.0468</b> |
| C                         | 10.22752        | 0.030884              | 331.1615    | 0.0000        |
| R-squared                 | 0.894069        | Mean dependent var    |             | 10.71904      |
| <b>Adjusted R-squared</b> | <b>0.888394</b> | S.D. dependent var    |             | 0.202847      |
| S.E. of regression        | 0.067766        | Akaike info criterion |             | -2.481168     |
| Sum squared resid         | 0.257166        | Schwarz criterion     |             | -2.341545     |
| Log likelihood            | 78.43503        | Hannan-Quinn criter.  |             | -2.426554     |
| F-statistic               | 157.5490        | Durbin-Watson stat    |             | 0.424592      |
| <b>Prob(F-statistic)</b>  | <b>0.000000</b> |                       |             |               |

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil uji T, diketahui bahwa variabel jumlah wisatawan domestik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,6184. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,6184 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan domestik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap



penerimaan pajak hotel. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel berbintang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,123, yang berarti lebih besar dari 0,05 ( $0,123 > 0,05$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel berbintang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat.

3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil uji T, variabel tingkat hunian hotel berbintang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0468, yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,0468 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat hunian hotel berbintang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat
4. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai probabilitas (F statistic) sebesar 0.000000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0.000000 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk signifikan secara statistik. Secara simultan, jumlah wisatawan domestik, jumlah hotel berbintang, dan tingkat hunian hotel berbintang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat.
5. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,888 menunjukkan penyesuaian nilai R-squared terhadap jumlah variabel independen dan sampel yang digunakan. Nilai ini memperlihatkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, sekitar 88,8% variasi penerimaan pajak hotel masih dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Adjusted R-squared biasanya digunakan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh banyaknya variabel bebas dalam model. Dengan nilai adjusted yang juga tinggi, hal ini mengonfirmasi bahwa model yang digunakan tetap efisien dan tidak overfitting.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel ditolak, hal itu dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,6184. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,6184 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan domestik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Ainun Jariah, 2023) dalam JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Mereka menemukan bahwa jumlah wisatawan, khususnya wisatawan domestik, tidak selalu memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak hotel. Salah satu penyebabnya adalah wisatawan domestik sering kali memilih akomodasi alternatif seperti rumah kerabat atau penginapan non-formal yang tidak dikenai pajak hotel. Penelitian lain oleh (Septiyani et al., 2024) juga mendukung hasil tersebut. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah wisatawan, namun dampaknya terhadap penerimaan pajak hotel tidak signifikan, karena perilaku konsumsi wisatawan tidak selalu tertuju pada sektor akomodasi formal.

### **Pengaruh Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel ditolak, hal itu dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,123, yang berarti lebih besar dari 0,05 ( $0,123 > 0,05$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa

jumlah hotel berbintang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pasaribu & Woyanti, 2024) dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Mereka menyatakan bahwa jumlah hotel tidak serta-merta meningkatkan penerimaan pajak jika tidak diiringi dengan tingkat okupansi yang tinggi. Dengan kata lain, keberadaan hotel harus diimbangi dengan tingginya tingkat hunian agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak hotel. Penelitian serupa oleh (Alamsyah, Sutanto, dan Suriadi et al., 2024) juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan jumlah hotel, belum tentu peningkatan tersebut berkontribusi pada penerimaan pajak hotel jika tingkat pemanfaatan kamar hotel masih rendah.

### **Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel diterima, hal itu dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0468, yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,0468 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, tingkat hunian hotel berbintang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Nur Ainun Jariah, 2023) yang menyebutkan bahwa tingkat hunian hotel merupakan faktor utama yang memengaruhi besarnya pajak hotel yang diterima pemerintah daerah. Tingkat hunian mencerminkan aktivitas ekonomi yang nyata di sektor perhotelan, karena pajak hotel dikenakan atas transaksi penggunaan kamar yang terpakai. Selain itu, penelitian oleh (Alamsyah, Sutanto, dan Suriadi et al., 2024) menyatakan bahwa keberhasilan daerah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak hotel lebih dipengaruhi oleh seberapa efektif hotel-hotel tersebut digunakan oleh wisatawan. Dengan kata lain, jumlah hotel tanpa hunian yang tinggi tidak akan memberikan kontribusi maksimal terhadap pajak hotel.

### **Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel**

Hipotesis keempat yang mengatakan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel diterima, hal itu dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menunjukkan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0.000000 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, jumlah wisatawan domestik, jumlah hotel berbintang, dan tingkat hunian hotel berbintang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Hasil ini didukung oleh penelitian (Nur Ainun Jariah, 2023) serta (Pasaribu & Woyanti, 2024) yang menyatakan bahwa meskipun secara parsial tidak semua variabel memiliki pengaruh signifikan, namun secara simultan ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi dalam penerimaan pajak hotel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda terhadap data jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel di Provinsi Jawa Barat selama periode 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan, variabel jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Provinsi Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memainkan peran penting dalam menentukan besarnya pendapatan pajak yang diterima dari sektor perhotelan.
2. Secara parsial, hanya tingkat hunian hotel yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat okupansi kamar hotel, semakin besar pula kontribusi pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.
3. Sementara itu, jumlah wisatawan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel secara langsung. Meskipun jumlah wisatawan meningkat, hal tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan penggunaan layanan hotel atau transaksi yang berdampak pada pajak. Kemungkinan ini terjadi karena tidak semua wisatawan menggunakan fasilitas hotel, atau karena adanya pergeseran tren akomodasi ke alternatif non-hotel seperti rumah sewa dan penginapan informal.
4. Begitu juga dengan jumlah hotel, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Artinya, bertambahnya jumlah hotel belum tentu meningkatkan pendapatan pajak, terutama jika hotel-hotel tersebut memiliki tingkat hunian yang rendah atau belum beroperasi secara optimal.
5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat hunian hotel menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan dan jumlah hotel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, pemerintah daerah disarankan untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas layanan dan strategi pemasaran hotel agar mampu meningkatkan tingkat hunian secara keseluruhan.
6. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa sektor pariwisata, terutama industri perhotelan, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak hotel. Oleh karena itu, strategi pembangunan sektor ini harus diarahkan untuk mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perluasan infrastruktur akomodasi, dan peningkatan efisiensi pengelolaan hotel.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Pemerintah Daerah Jawa Barat, disarankan agar terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan promosi wisata, pengembangan destinasi baru, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi dan fasilitas publik di sekitar objek wisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, secara tidak langsung akan mendorong peningkatan penerimaan pajak hotel.
2. Dalam hal pengelolaan jumlah hotel, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya mendorong pembangunan hotel baru, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut seimbang dengan pertumbuhan permintaan pasar. Diperlukan regulasi yang mengatur zonasi pembangunan hotel serta pemberian insentif bagi hotel yang memiliki tingkat hunian tinggi dan mematuhi kewajiban pajak.
3. Terkait tingkat hunian hotel, diperlukan kebijakan yang mendukung optimalisasi

pemanfaatan kamar hotel yang ada. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen operasional bagi pengusaha hotel, promosi terpadu antara pelaku wisata dan perhotelan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menggelar event atau atraksi wisata yang menarik wisatawan untuk menginap lebih lama.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti lama menginap tamu, tingkat pengeluaran wisatawan, dan faktor eksternal seperti inflasi atau kondisi ekonomi makro yang dapat mempengaruhi daya beli dan preferensi wisatawan. Selain itu, cakupan penelitian bisa diperluas pada skala kabupaten/kota agar memberikan gambaran yang lebih spesifik dan implementatif bagi pemerintah daerah setempat.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Fariz, M. G., & Arianti, F. (2023). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Dan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Sektor Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 - 2019. *BISECEER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.430>
- Anugrahni Anatasya Dea. (2021). Bab II Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis. *Teori Prospek, Teori Fuzzy-Trace, Keputusan Individu-Kelompok, Dan Tanggung Jawab Dalam Pengambilan Keputusan*, 1981, 1–22. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Ginting, Ruth Rasta (2022) PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, INFLASI, DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2017 – 2020. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2020). *BAB I*. 1–9.
- Berau, K. (n.d.). *Eco-build journal*. 8(2).
- Darwin, Muhammad, at all. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*.
- Erliyatn, N., Pranjoto, R. G. H., & Samsuki. (2023). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura*. 6(November), 623–636.
- Farkhan - Jurnal Pajak 4.pdf*. (n.d.).
- Jumlah, P., Wisata, O., Wisatawan, J., & Mataram, U. (2024). *EKONOBIS*. 10(2), 100–114.
- Khaerunnizam, M., & Fadli, M. D. (2025). *ANALISIS PENGARUH JUMLAH WISATAWAN , TINGKAT HUNIAN HOTEL , DAN LAMA MENGINAP TAMU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARATTAHUN 2004-*. 4(1), 71–80.
- Kuliah, M. (2011). Surat Tugas Surat Tugas. *Sttkao.Ac.Id*, 11, 11–12. [https://sttkao.ac.id/storage/penelitian/5g\\_penelitian\\_bersama\\_finall\\_210722080700.pdf](https://sttkao.ac.id/storage/penelitian/5g_penelitian_bersama_finall_210722080700.pdf)
- metodologi penelitian Akuntansi kuantitatif - Search - WeLib.pdf*. (n.d.).
- No Title*. (2023). 6(1), 9–17.
- Pasaribu, T. G., & Woyanti, N. (2024). *12126-60194-1-Pb (1)*. 7(1), 215–232.
- Penduduk, P. J., Wisatawan, J., & Terhadap, H. (2024). *INDEPENDENT : Journal Of Economics E-ISSN : 2798-5008*. 4, 95–111.
- Perkapita, P., Terhadap, D. A. N. I., & P, D. V. (2020). *REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA SEMARANG TAHUN 2010-2017*. 9, 1–8.
- Rieshe, R., & Aji, A. W. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap Pad Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

- 
- Keuangan*, 16(2), 79. <https://doi.org/10.21460/jrak.2020.162.375>
- Sari, M., Sari, R., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 13. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.419>
- Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>
- Wicaksono, G., Wahyudi, I., Anggraini, F., Lestari, P., Purwanti, A., Ristiyana, R., Alamanda, A. R., Adhi, D. K., Anggraini, D., & Aristantia, S. E. (n.d.). *No Title*.
- Wisatawan, A. J., Hotel, J., Tingkat, D. A. N., Hotel, H., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (n.d.). *R . T . L . Rumimpunu J . Morasa H . R . N . Wokas TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MANADO ANALYSIS OF TOURISM , NUMBER OF HOTELS AND RESIDENCE ON HOTEL TAX RECEIVABLES IN MANADO CITY Jurnal EMBA Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 350 - 357*. 9(4), 350–357.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. ISBN, UNDIP Semarang.
- Sanusi, Ahmad. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.